

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 *Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007.* (2008). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2006). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2011). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.* (2016). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.* (2013). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 *Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.* (2015). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Internal.* (2008). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akutansi Pemerintah.* (2010). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah.* (2014). Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013.* Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014.* Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015*. Jakarta.

Badara, M. S. & Saidin, S. Z., (2013). 'Impact of the effective internal control system on the internal'. *Journal of Social and Development Sciences*, Vol. 4, No. 1, (ISSN 2221-1152), Malaysia. Page 27-40.

Bawono, I. R. & Novelsyah, M. (2012). *Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pada skpd dan skpkd (pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi)*. Jakarta: Salemba Empat.

Boyle, E.J., Cooper, S.M. & Geiger, M.A. (2004). 'An empirical analysis of internal control weaknesses under sas no. 78: an examination of state audit reports'. *Accounting Faculty Publications*. Paper 16. Page 1-27.

Damayanti, T.W. & Sari, P.S. (2011). 'Kelemahan material: analisis atas ukuran pemerintahan dan belanja modal serta dampaknya terhadap opini auditor (studi pada Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah)'. *JMK*, Vol. 9, No. 2. Hlm 42-68.

Erlina. (2015). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dan permendagri nomor 64 tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat.

Fauza, N. (2015). 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah'. *Jom FEKON*, Vol. 2, No, 2. Hlm 1-15.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akutansi keuangan daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. & Kusufi, M.S. (2014). *Akutansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, S. S. (2012). *Teori akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hartono, R., Mahmud & Utaminingsih, N. S. (2014). ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern’. *Symposium Nasional Akuntansi 17 Mataram*, Lombok. Hlm. 1-13.
- Herawati, Tuti. (2014). ‘Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (survei pada organisasi perangkat daerah pemerintah daerah Cianjur)’. *Study and Accounting Research*, Vol. 11, No. 1. Hlm 1-25.
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Auditing Seksi 319. *Pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keuangan*. PSA No. 69. Jakarta.
- Kawedar, W. (2009). ‘Opini audit dan sistem pengendalian internal’. *Journal of Accounting and Auditing*, Vol. 6, No. 1. Hlm 1-20.
- Kristanto, S. B. (2009). ‘Pengaruh ukuran pemerintahan, pendapatan asli daerah (pad), dan belanja modal sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal’. *Jurnal UKRIDA*, Vol. 9, No. 1. Hlm.1-17.
- Kasmir. (2012). *Analisis laporan keuangan*. Edisi 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martani, D. & Zaelani, F. (2011). ‘Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas terhadap pengendalian intern pemerintah daerah studi kasus di Indonesia’. *Symposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*. Hlm 1-27.
- Nurwati, I. & Trisnawati, R. (2015). ‘Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah (studi kasus pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah periode 2011-2012)’. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. Hlm 363-373.
- Petrovits, C., Shakespeare, C. & Shih, A. (2010). ‘The causes and consequences on internal control problems in nonprofit organizations’. *American Accounting Association*, Vol. 86, No. 1. Page 325-357.
- Putri, N. K. & Mahmud, A. (2015). ‘Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pad, ukuran dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian internal’. *Accounting Analysis Journal (4)* 2. Hlm 1-8.

- Rachmawati, D. E. & Handayani, N. (2016). ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota’. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No.4. Hlm 1-17.
- Raharjo, E. (2007). ‘Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi’. *Fokus Ekonomi*, Vol. 2, No. 1. Hlm. 1-25.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Saputro, E. A. & Mahmud, A. (2015). ‘Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah’. *Accounting Analysis Journal* (4) 3. Hlm 1-9.
- Suwanda, D. & Dalibas. (2013). *Sistem pengendalian internal pemerintah daerah*, PPM.
- Tunggal, A. W. (2014). *Mendeteksi kecurangan dalam akuntansi*. Jakarta: Harvarindo.
- Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. (2016). *Pedoman penulisan tugas akhir skripsi tahun 2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hlm 2-48.
- Waliyyani, G. M. (2015). ‘Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah’, *Accounting dan Analysis* (4) 2. Hlm 1-17.
- Wanda. (2015). Bpk temukan 3.293 masalah. Diakses: 25 September 2016, dari <http://kpnpos.com/bpk-temukan-3-293-masalah/>.
- Yamin, R. & Sutaryo. (2015). ‘Faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah di Indonesia’. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*. Hlm. 17-26.